


Analisis Persepsi Masyarakat tentang Program BLT di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten banyumas

¹⁾Laila Sabrina, ²⁾Annida Faqih, ³⁾Cika Ayuadela, ⁴⁾Ibnu Nur Adim Fadilah, ⁵⁾Riska Fiyana, ⁶⁾Muhammad Revanza Kyla Ananta, ⁷⁾Ratna Dewi

^{1,2,3,4,5,6,7)}Sosiologi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Indonesia
Email Corresponding: laila.sabrina@mhs.unsoed.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Bantuan Persepsi Pemerintah Ekonomi Kesejahteraan	BLT (Bantuan Langsung Tunai) merupakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah berupa pemberian bantuan finansial kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sasaran utama dari program BLT yaitu masyarakat kelas menengah ke bawah atau masyarakat kurang mampu. Selama pelaksanaannya, program BLT banyak memunculkan persepsi tidak hanya dari masyarakat yang menerima, melainkan juga dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang adanya program BLT, khususnya masyarakat di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara. Dalam mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat, pengabdian ini menggunakan metode kuantitatif berupa survei dengan menggunakan angket (kuesioner). Hasil pengabdian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Bobosan tentang adanya program BLT sangat bervariasi. Sebagian besar responden menganggap program BLT ini sebagai salah satu langkah positif pemerintah dalam membantu masyarakat yang kekurangan secara ekonomi. Mayoritas masyarakat juga mengatakan bahwa program BLT di Kelurahan Bobosan sudah sesuai dengan yang diharapkan.
Keywords: Aid Perception Government Economic Welfare	ABSTRACT BLT (Direct Cash Assistance) is a program implemented by the government in the form of providing financial assistance to the community with the aim of improving economic welfare. The main target of the BLT program is the lower middle class or underprivileged communities. During its implementation, the BLT program raised many perceptions not only from the people who received it, but also from all levels of society. Therefore, this service was carried out to find out how the community perceives the existence of the BLT program, especially the community in Bobosan Village, North Purwokerto District. In collecting data regarding community perceptions, this service uses quantitative methods in the form of surveys using questionnaires. The results of the service show that the perception of the Bobosan Village community regarding the existence of the BLT program varies greatly. Most respondents considered the BLT program to be one of the government's positive steps in helping economically disadvantaged people. The majority of people also said that the BLT program in Bobosan Village was as expected.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan dan sandang atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan inti atau primer, yang diukur berdasarkan pengeluaran (sesuai data BPS tahun 2019). Secara keseluruhan, antara bulan September 2006 hingga 2019, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dalam jumlah maupun persentase. Pemerintah membuat berbagai program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang senantiasa diarahkan

dan ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat berbagai macam program pembangunan dan pengentasan ekonomi belum sepenuhnya bisa mengatasi karena kendala yang dihadapi saat ini adalah peningkatan subsidi BBM sebagai akibat dari harga minyak mentah yang meningkat di pasar global. Jika subsidi BBM tersebut tidak dapat dikendalikan, hal itu akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan ke depan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan mayoritas penduduk.

Dari kondisi tersebut, maka pemerintah membuat kebijakan ataupun program untuk menanggulangi masalah yang terjadi. Salah satunya yaitu program Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau sering disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau berupa bantuan lainnya baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tidak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin supaya dapat meningkatkan hidup yang lebih baik. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 dengan memberikan bantuan tunai sebesar 1,2 juta setiap tahunnya, bertujuan untuk mengurangi dampak pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) terhadap rumah tangga miskin (seperti yang dijelaskan oleh World Bank pada tahun 2017). Program ini mengincar 30% dari rumah tangga paling miskin di Indonesia, yang mencakup sekitar 15 hingga 19 juta rumah tangga.

Kelurahan Bobosan merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Kelurahan Bobosan menempati posisi pertama dengan wilayah pertanian / tanah sawah terluas. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas tahun 2021 diperoleh data hasil panen/pertanian masyarakat Kelurahan Bobosan merupakan kelurahan yang paling unggul atau kelurahan yang memperoleh persentase tertinggi yaitu sebesar 831,9 Kuintal dalam hal hasil pertanian. Hasil pertanian yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan petani dan pekerja pertanian di kelurahan tersebut. Jika pendapatan mereka meningkat, ini dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi warga Kelurahan Bobosan.

Kelurahan Bobosan penerima BLT per RW desa Bobosan cukup tinggi dan Kelurahan Bobosan sendiri merupakan kelurahan penerima BLT terbanyak kedua setelah Kelurahan Sumampir. Hal tersebutlah yang menjadi titik fokus dari penulis, Bobosan sendiri terbukti memiliki hasil pertanian yang jauh lebih tinggi dibanding Sumampir yang hanya sebesar 316,98 ini juga mempertimbangkan bagaimana syarat dari pendaftaran BLT yang harus dipenuhi antara lain Pertama, warga miskin atau rentan miskin. Kedua, bukan aparatur sipil negara (ASN), Polisi, atau TNI. Ketiga, terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam DTKS Kemensos. Keempat, warga atau pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta. Dalam situasi dimana Kelurahan Bobosan yang merupakan desa dengan jumlah hasil panen padi yang cukup tinggi, serta mendapatkan kuota BLT yang tinggi juga, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang terlibat mengapa hal tersebut terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada kelurahan tersebut dan mencari tahu persepsi masyarakatnya terhadap penerima BLT di Kelurahan Bobosan tersebut.

Pengabdian kami berfokus pada Kelurahan Bobosan karena jika dihitung dari jumlah penduduk, Kelurahan Bobosan memiliki perbandingan antara warga penerima BLT 643 orang dan jumlah seluruh warganya 5.810 orang yaitu 1:9. Sedangkan dalam tabel lingkaran diatas diperoleh daerah yang paling banyak kuota penerima BLT-nya yaitu Kelurahan Sumampir sebanyak 671 warga penerima BLT dari 9378 jumlah warga Kelurahan Sumampir atau 1:14. Perbandingan tersebut menjadikan alasan mengapa penelitian kami memilih Kelurahan Bobosan walaupun Kelurahan Sumampir memiliki jumlah penerima BLT paling banyak di Purwokerto Utara, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya, Kelurahan Bobosan memiliki penerima BLT yang lebih banyak.

Penelitian yang dilakukan oleh Novrizal, Muhammad (2022) yang berjudul *Persepsi Masyarakat Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Bagi Masyarakat Miskin di Era Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa)* meneliti persepsi Masyarakat Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Bagi Masyarakat Miskin di Era Pandemi COVID-19 Tahun 2020 di Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa yang hanya meliputi persepsi masyarakat dalam pendistribusian atau proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) dan kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) sedangkan penelitian kami tidak sekedar meneliti persepsi masyarakat mengenai proses pelaksanaannya saja namun meliputi persepsi masyarakat mengenai pengetahuan pemahaman adanya program BLT, pelaksanaan program BLT, kesesuaian target penerima BLT, keefektifan program BLT kepada penerima. Selanjutnya penelitian oleh Amran dkk (2022) yang berjudul *Analisis Persepsi Masyarakat Nagari Tandikek*

Utara Tentang Bantuan Pemerintah Selama Masa Pandemi Covid 19 yang menganalisis persepsi masyarakat Nagari Tandikek Utara tentang bantuan yang disalurkan pemerintah selama pandemi Covid 19. Dalam penelitian ini responden yang dipilih adalah masyarakat yang menerima bantuan dari pemerintah yang terdiri dari bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia di Nagari Tandikek Utara dan Program Keluarga Harapan. Sedangkan penelitian kami, responden yang dipilih yaitu seluruh warga Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara baik penerima bantuan maupun bukan penerima, hal ini bertujuan untuk mengetahui persepsi adanya program BLT dari banyak sudut pandang, baik penerima maupun non penerima.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, menunjukkan bahwa masih terdapat banyak kelemahan dalam pengelolaan BLT tersebut, terutama dalam proses penyalurannya, sehingga membawa dampak berupa ketidakpuasan rakyat akan hasil metode penyaluran yang digunakan. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap program BLT di Kelurahan Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten banyumas yang dilihat berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun objeknya sama (Wahyuningsih et al., 2021).

II. MASALAH

Berdasarkan pengamatan di lapangan, masih banyak kelemahan dalam pengelolaan dana BLT tersebut, terutama dalam proses penyalurannya, sehingga membawa dampak berupa ketidakpuasan rakyat akan hasil dari model penyaluran yang digunakan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap program BLT.



Gambar 1. Wawancara Masyarakat

III. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, menggunakan kuesioner dalam bentuk pertanyaan dengan media google form juga wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi di wilayah penelitian. Survei merupakan prosedur dimana peneliti melaksanakan survei atau memberikan angket atau skala pada satu sampel untuk mendeskripsikan sikap, opini, perilaku, atau karakteristik responden. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008:3).

Dari hasil survei ini, mengidentifikasi dua tujuan utama dalam penelitian survei, yaitu pertama, memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu topik, dan kedua, melakukan analisis. Esensi dari penelitian survei adalah pengumpulan data dan informasi melalui wawancara atau kuesioner dalam rangka memberikan penjelasan tentang suatu penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Simple Random Sampling*. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Bobosan. Sampel penelitian diambil menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael. Maka jumlah sampel yang digunakan adalah 237 masyarakat Bobosan dengan taraf kesalahan 10%, Populasi berdasarkan jumlah Kartu Keluarga yaitu 1914. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Distribusi Frekuensi

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yaitu sebuah metode penyusunan yang dimulai dari data yang terkecil (terendah) sampai

yang terbesar (tertinggi) atau sebaliknya (Nanang, 2015). Pada tahap penyajian data, data yang sudah dikelompokkan disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Metode analisis data menggunakan distribusi frekuensi melalui aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Scene*).

2. Uji Validitas

Uji Validitas yang digunakan adalah Pearson. Uji validitas digunakan setelah analisis data Distribusi Frekuensi digunakan. Dalam Uji validitas dilakukan pada responden sebanyak 237 masyarakat Bobosan. Untuk mengukur validitas kuesioner yang diberikan kepada responden maka digunakan koefisien korelasi product moment dengan menggunakan bantuan program SPSS dan menggunakan tingkat signifikan 0,01. Pada Uji Validitas yang dilakukan seluruh pertanyaan dinyatakan Valid sehingga dapat digunakan.

3. Uji Reliabilitas (*alphan cronbachs*)

Uji reliabilitas ini dilakukan pada responden sebanyak 237 masyarakat Bobosan dengan menggunakan pertanyaan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas dan akan ditentukan reliabilitasnya. Reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Untuk mencapai hal tersebut, dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach's* diukur berdasarkan skala *Alpha Cronbach's* 0 sampai 1.

Dari tabel output diketahui ada N of items ada 29 dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.392 dibandingkan dengan nilai r tabel dengan nilai N=237 yaitu 0.138 (r tabel) pada signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa angket kuesioner tersebut dinyatakan reliabel atau terpercaya sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menguraikan temuan data yang diperoleh dari dari 237 responden. Responden telah dipilih secara acak dengan menggunakan *Simple Random Sampling*, satu persatu responden diberikan instrumen berisikan pernyataan dan pertanyaan dan wawancara lebih lanjut. Analisis data yang digunakan adalah Distribusi Frekuensi. Persepsi terhadap BLT digambarkan melalui pandangan masyarakat secara general. Persepsi ini diartikan sebagai cara pandang masyarakat atau tanggapan terkait adanya program BLT dari pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

Program BLT merupakan salah satu program yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dianggap kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, dan faktanya program BLT mengalami banyak masalah dalam penerapannya. Mulai dari anggapan bahwa program ini salah sasaran, program BLT membuat ketergantungan masyarakat hingga program BLT tidak benar dalam pelaksanaannya, namun program ini juga dianggap sukses oleh beberapa kalangan.

Responden penelitian ini adalah warga Kelurahan Bobosan, Purwokerto Utara, Banyumas, yang berasal dari 4 Rw yaitu RW 1, RW 2, RW 3, dan RW 4 dengan jumlah 237 responden. Data penelitian yang diperoleh dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner melalui *google form*. Dari penyebaran kuesioner tersebut, diperoleh hasil deskripsi responden, yaitu jenis kelamin, usia, asal RW, jenis pekerjaan, jenjang pendidikan, serta penghasilan perbulan. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh 237 responden, diketahui bahwa sebanyak 77 responden atau 32.5 % berjenis kelamin laki-laki dan 160 atau 67.5% berjenis kelamin perempuan. Selain itu, dari empat RW responden didominasi oleh RW 4 yaitu sebanyak 75 responden (31.6), RW 2 yaitu 57 (24.1), RW 1 yaitu 55 (23.2), dan RW 3 yaitu 50 responden (21.1).

Tabel 1. Jenjang pendidikan

Jenjang Pendidikan	Frequency	Percent
Tidak Sekolah	3	1.3
SD	96	40.5
SMP/MTS	37	15.6
SMA/MA/SMK	81	34.2
D2	3	1.3
D3	1	0.4
S2	16	6.8
Total	237	100.0

Sumber : Data Primer (2023)

Tabel 2. Usia Responden

Usia	Frequency	Percent
>30	30	12.4

31 - 40	32	13.9
41 - 50	50	21.2
51 - 60	60	25.5
61 <	55	23.3

Sumber : Data Primer (2023)

Dari 237 responden survei mengenai BLT didominasi ibu rumah tangga yaitu 104 (43.9) dengan jenjang pendidikan terakhir didominasi SD 96 (40.5) lalu diikuti jenjang pendidikan SMA yaitu 81 (34.2) serta pendapatan perbulan didominasi dibawah 999.9999 yaitu sebanyak 175 (73.8). Responden dari penelitian ini adalah masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu di lingkungan desa Bobosan sehingga mereka lebih banyak melakukan interaksi antara satu sama lain. Responden dari penelitian ini didominasi oleh responden dengan usia diatas 40 tahun. Usia tersebut adalah usia kurang produktif sehingga kebanyakan dari responden tersebut tidak bekerja.

Tabel 3. Responden Mengetahui Program BLT

Mengetahui tentang program BLT	Frequency	Percent
Ya	212	89.5
Tidak	25	10.5
Total	237	100.0

Sumber : Data Primer (2023)

Pengetahuan mengenai program BLT merupakan langkah awal dalam persepsi maupun cara masyarakat memandang apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, sebanyak 212 orang dengan persentase 89,5% telah mengetahui program BLT. Menurut Notoatmodjo dalam Naomi (2019), pengetahuan (knowledge) merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Hal tersebut berarti mayoritas masyarakat Bobosan sudah diberikan *awareness* dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah desa dan pengurus program BLT sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Selain itu, interaksi masyarakat bobosan dan sifat kekeluargaan di desa tersebut yang masih tinggi membuat pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan cukup merata terutama bagi masyarakat dengan usia produktif. Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat terkait eksistensi dari program BLT adalah keterbukaan masyarakat penerima program BLT terhadap masyarakat lain.

Kemudian, sebanyak 25 orang dengan persentase 10,5% tidak mengetahui sama sekali tentang program BLT. Ketidaktahuan atau ketidak pahaman yang dialami masyarakat ini karena mereka cenderung tidak mendapat sosialisasi terkait adanya program tersebut serta masyarakat yang tidak mengetahui eksistensi adanya program BLT. Dari hasil survey yang kami lakukan, responden yang tidak mengetahui program BLT adalah pensiunan lansia. Hal ini dikarenakan memang kebanyakan di usia tersebut melemahnya kapasitas untuk produktif dan aktif didalam masyarakat/ berpartisipasi secara langsung. Hal ini lah yang membuat masyarakat di usia tersebut kebanyakan tidak mengetahui tentang program BLT itu sendiri.

Tabel 4. Penerima BLT

Responden merupakan penerima BLT	Frequency	Percent
Ya	103	43.5
Tidak	134	56.5
Total	237	100.0

Sumber : Data Primer (2023)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, sebanyak 103 orang dengan persentase 43,5% ditetapkan sebagai penerima BLT. Kemudian, sebanyak 134 orang dengan persentase 56,5% tidak ditetapkan sebagai penerima program BLT. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh masyarakat yang tidak menerima BLT tetapi 103 orang sudah menerima program BLT hal tersebut berarti masyarakat kebanyakan sudah mengetahui dan merasakan langsung bagaimana program tersebut berjalan.

Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 56.5%, tidak ditetapkan sebagai penerima program BLT. Serta sebanyak 43.5% dari responden telah ditetapkan sebagai penerima BLT. Hal tersebut menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang telah mendapatkan manfaat dari program BLT. Lebih dominan masyarakat yang tidak menerima BLT disebabkan kriteria seleksi kurang tepat. Responden merasa menyayangkan kriteria yang seakan kurang memihak untuk mereka bisa mendapatkan program BLT itu sendiri.

Tabel 5. Pemahaman Tentang Program BLT

Memahami Program BLT	Frequency	Percent
Sangat Memahami	8	3.4
Memahami	182	76.8
Kurang Memahami	29	12.2
Tidak Memahami	15	6.3
Sangat Tidak Memahami	3	1.3
Total	237	100.0

Sumber: Data primer (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden cenderung lebih memahami program BLT. Dapat dilihat dari jawaban responden yang mayoritas (76.8%) mengatakan bahwa mereka "Memahami" pernyataan tersebut, sementara 6.3% "Tidak memahami". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami program BLT.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dilakukan bahwa dengan angka persentase sebagian besar responden sebanyak 76.8% memahami tentang program BLT. Namun sebagian kecil responden yang tidak memahami dengan persentase 6.3%. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dari hasil tersebut menunjukkan adanya tingkat pemahaman yang positif program BLT di kalangan responden. Hal tersebut disebabkan responden mendapatkan informasi yang cukup mengenai program BLT dari pemerintah dan petugas yang bersangkutan. Delapan responden yang menjawab sangat memahami terkait program ini ketiganya merupakan pengurus dari program BLT itu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sudijono (2011: 50) bahwa "Pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan diingat". Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki pemahaman terkait program BLT dan mengingatnya mulai dari tujuan, kriteria dan fungsi dari program tersebut diciptakan berarti sosialisasi dan transparansi dari pemerintah desa sudah cukup baik terhadap masyarakat sehingga mayoritas masyarakat desa Bobosan memiliki pemahaman yang cukup baik.

Tabel 6. Kriteria Penerima BLT

Kriteria	Frequency	Percent
Ya	85.7	203
Tidak	14.3	34
Total	100.0	237

Sumber : Data Primer (2023)

Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 85.7% telah mengetahui kriteria penerima program BLT. Kriteria adalah standar penentuan atau aturan-aturan dasar yang mana alternatif keputusan-keputusan diurutkan menurut keinginan kriteria itu sendiri, atau dengan kata lain kriteria adalah suatu istilah umum yang meliputi konsep-konsep dari atribut dan sasaran (Malczewski, 1999). Kriteria berarti ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Mayoritas dari masyarakat sudah mengetahui kriteria dari penerima BLT hal tersebut berarti pemerintah sudah melakukan sosialisasi yang cukup baik terkait dengan kriteria penerima BLT ditambah dengan pertukaran informasi di tengah masyarakat di Bobosan cukup cepat. Faktor lain yang mempengaruhi pemahaman terkait kriteria penerima BLT masyarakat Bobosan karena adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar dan program pemerintah.

Namun, terdapat 34 responden yang tidak mengetahui kriteria penerima program BLT hal ini disebabkan oleh sosialisasi atau penyampaian informasi yang mencukupi mengenai kriteria penerima program BLT

yang tidak sampai kepada individu atau kelompok tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi ketidaktahuan masyarakat terhadap kriteria program BLT adalah sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya, yang mana masyarakat lebih cenderung fokus terhadap diri sendiri dibanding harus mencampuri urusan individu lain.

Tabel 7. Kasus orang yang tidak memenuhi persyaratan

Kasus orang yang tidak memenuhi persyaratan tapi menerima BLT	Frequency	Percent
Sangat Setuju	15	6.3
Setuju	87	36.7
Kurang Setuju	111	46.8
Tidak Setuju	21	8.9
Sangat Tidak Setuju	3	1.3
Total	237	100.0

Sumber : Data Primer (2023)

Banyak berita beredar mengenai kasus-kasus orang yang seharusnya tidak memenuhi persyaratan tetapi menerima BLT. Dengan ini kami survei apakah hal tersebut memang benar terjadi. 46.7% responden menyatakan kurang setuju dengan pernyataan tersebut karena program tersebut sudah sesuai penyiangan dan pengawasan oleh pengurus sehingga dianggap sudah sesuai target yaitu pada masyarakat yang kurang mampu. Dan terdapat sebanyak 36,7% menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Ketidaksesuaian dalam mendata disebabkan oleh petugas pendata tidak mematuhi kriteria yang ditetapkan memenuhi minimal 9 kriteria dari 14 kriteria syarat penerima BLT (Akib I & Risfaisal, 2015). Mayoritas responden setuju bahwa pada pelaksanaan program BLT tidak ada bias dalam pemilihan penerimanya. Menurut Ripley (dalam Purwanto & Sulistyastuti 2012:108) bias merupakan indikator untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh implementer bias (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran atau tidak eligible untuk menikmati bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui suatu program. Jika terdapat Keluarga Penerima Manfaat yang bukan sasaran program BLT, berarti dapat dikatakan terjadi bias.

Namun, 87 responden atau 36.7 menyatakan bahwa mereka setuju terhadap pernyataan tersebut hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait persyaratan yang ada pada program BLT itu sendiri. Selain itu, masyarakat menganggap banyak masyarakat yang seharusnya lebih pantas menerima program BLT dibanding penerima saat ini. Masyarakat menganggap banyak sekali penerima yang salah sasaran dan tidak 100% memenuhi kriteria penerima BLT, masyarakat menganggap bahwa banyak penerima yang terdaftar program BLT karena mereka memiliki relasi dengan pengurus program BLT itu sendiri.

Tabel 8. Informasi dari pemerintah

Pemerintah Pusat Telah Memberikan Informasi yang Jelas	Frequency	Percent
Ya	154	65.0
Tidak	83	35.0
Total	237	100.0

Sumber: Data primer (2023)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, sebanyak 154 orang dengan persentase 65% telah merasa bahwa pemerintah pusat telah memberikan informasi yang jelas mengenai program BLT. Kemudian, sebanyak 83 orang dengan persentase 35% tidak mengetahui sama sekali bahwa pemerintah pusat telah memberikan informasi yang jelas mengenai program BLT.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dilakukan bahwa dengan angka persentase sebagian besar responden sebanyak 65% memilih jawaban "iya" tentang merasa pemerintah pusat telah memberikan informasi yang jelas mengenai program BLT. Hal ini disebabkan responden diberikan informasi secara berkala tentang program BLT dari pemerintah desa melalui petugas yang bersangkutan dengan dibantu para ketua RW menyebarkan informasi melalui *WhatsApp Group*. Kecanggihan teknologi semakin memungkinkan manusia untuk mendapatkan yang diinginkan, termasuk dalam penyebaran informasi

Pemerintah, khususnya Humas yang menjalankan peran sebagai corong dalam menyampaikan segala informasi kepada khalayak (Juanda, 2017). Dapat disimpulkan bahwa adanya teknologi membantu masyarakat mudah mendapatkan informasi sehingga mereka dimudahkan dalam transparansi program BLT, mereka tidak perlu lagi datang langsung ke pusat pemerintahan atau pusat informasi BLT.

Sementara itu, terdapat sebanyak 35% responden ada yang menjawab "tidak" tentang merasa pemerintah pusat telah memberikan informasi yang jelas mengenai program BLT karena kurangnya pemerintah memperhatikan sasaran penerima informasi. Responden merasa bahwa informasi disampaikan secara langsung maupun secara *online* mengenai program BLT yang diberikan oleh pemerintah tidak sampai kepada mereka.

Tabel 9. Kesesuaian untuk penerima Program BLT

Penerima BLT Sudah Sesuai Target	Frequency	Percent
Sangat Setuju	4	1.7
Setuju	105	44.3
Kurang Setuju	81	34.2
Tidak Setuju	41	17.3
Sangat Tidak Setuju	6	2.5
Total	237	100.0

Sumber: Data primer (2023)

Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bahwa mayoritas responden setuju mengenai kesesuaian target penerima program BLT yaitu dengan persentase 44,3%, hal tersebut berhubungan dengan pengetahuan responden yang baik mengenai kriteria penerima BLT. Mayoritas responden mengatakan bahwa mereka setuju bahwa penerima BLT sudah sesuai target sehingga dapat disimpulkan bahwa penjangkauan kesesuaian penerima BLT sudah cukup baik dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dilansir dari laman Dinsos Jogjaprovo.go.id, menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, DTKS diupdate secara berkala dengan penetapan setiap bulan oleh Menteri Sosial RI. Sedangkan data penerima bantuan sosial merupakan data yang telah disahkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan sosial tertentu periode tertentu. Usulan Penerima Bantuan Sosial bersumber dari DTKS yang seharusnya telah melalui proses verifikasi kelayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Apabila kemudian diperoleh temuan/laporan bahwa ada penerima bantuan sosial terbukti tidak layak mendapatkan bantuan sosial, maka Dinas Sosial Kab/Kota dapat menindaklanjuti dengan menidaklayakkan, sehingga tidak kembali masuk dalam usulan bantuan sosial periode berikutnya hal tersebut yang mendasari bahwa penerima BLT sudah sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Sedangkan 34,2% responden yang menyatakan kurang setuju mengenai kesesuaian target penerima program BLT. Hal tersebut dapat disebabkan adanya kriteria yang kurang tepat yang melewati orang-orang yang seharusnya memenuhi syarat atau malah memberikan bantuan kepada yang seharusnya tidak memenuhi syarat dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Faktor lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat terkait kondisi asli dari penerima BLT dan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 10. Ketergantungan terhadap dana BLT

Penerima BLT mengalami ketergantungan	Frequency	Percent
Sangat setuju	34	14.3
Setuju	99	41.8
Kurang setuju	83	35.0
Tidak setuju	20	8.4
Sangat tidak setuju	1	0.4
Total	237	100.0

Ketergantungan adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, negara-negara tersebut hanya

berperan sebagai penerima akibat saja (Titonio Dos Santos, 1970). Hal tersebut sama dengan individu yang hidup dipengaruhi oleh dana BLT. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden cenderung lebih mengalami ketergantungan terhadap program BLT. Dapat dilihat dari jawaban responden yang mayoritas (41.8%) mengatakan bahwa mereka "Setuju" dengan pernyataan tersebut, sementara 35.0% "kurang setuju". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung lebih mengalami ketergantungan terhadap program BLT. Ketergantungan terhadap program BLT merupakan dampak negatif yang terjadi di masyarakat terhadap program BLT pemerintah (Akib Irwan & Risfaisal, 2015).

Hal tersebut terjadi disebabkan adanya kondisi ekonomi yang sulit di kalangan responden, sehingga program BLT menjadi suatu hal yang dinanti-nanti oleh mereka. Dan ada faktor lainnya seperti tingkat pengangguran atau ketidakpastian panggilan untuk bekerja juga dapat mempengaruhi persepsi responden terhadap ketergantungan pada program tersebut. Penerima BLT juga merasa terbantu dengan adanya program BLT hal tersebut menyebabkan mereka sangat menunggu dan bergantung dengan adanya program tersebut. Mental masyarakat yang menerima bantuan di tidak dapat meningkatkan performans dalam bekerja. Dengan kata lain tingkat produktivitas tetap rendah dan mengutamakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan (Siyoum, et al., 2012). Masyarakat mayoritas menganggap bahwa adanya program BLT ini tidak membuat penerimanya semakin produktif dalam bekerja sehingga masyarakat berasumsi adanya program ini menyebabkan ketergantungan.

Tabel 11. Membantu penerima keluar dari situasi ketergantungan

Program BLT Cukup Membantu penerima untuk Keluar dari Situasi Ketergantungan	Frequency	Percent
Ya	135	57.0
Tidak	102	43.0
Total	237	100.0

Sumber: Data primer (2023)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, sebanyak 135 orang dengan persentase 57% telah merasa bahwa program BLT bisa menjadikan penerima keluar dari situasi ketergantungan. Meskipun penerima program BLT cenderung mengalami ketergantungan terhadap program BLT, namun responden menyatakan bahwa program BLT membuat para penerimanya keluar dari situasi ketergantungan. Mayoritas responden setuju bahwa adanya program BLT juga membantu masyarakat keluar dari ketergantungan karena terdapat program PKH (Program Keluarga Harapan) untuk ibu-ibu yang mana dapat digunakan untuk membuka usaha dan sebagainya.

Sebanyak 102 orang dengan persentase 43% tidak merasa bahwa program BLT bisa menjadikan penerima keluar dari situasi ketergantungan. Hal ini karena Program BLT merubah masyarakat menjadi ketergantungan karena menunggu pembagian dari pemerintah akhirnya budaya malas bekerja tumbuh (Mustarin, 2021). Masyarakat sekedar menerima bantuan cenderung akan terus mengharapkan tanpa adanya program lainya seperti pelatihan-pelatihan khusus untuk membantu mereka memiliki kemandirian ekonomi.

Sehingga hal tersebut akan berdampak pada kemandirian ekonomi masyarakat karena dana yang diberikan tidak dapat membuat masyarakat mendapatkan skill yang dapat digunakan untuk bekerja atau membuka usaha.

Tabel 12. Penerima menggunakan dana bantuan bukan untuk kebutuhan Primer

Menggunakan dana bantuan bukan untuk kebutuhan Primer	Frequency	Percent
Ya	94	39.7
Tidak	143	60.3
Total	237	100.0

Sumber: Data primer (2023)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, sebanyak 94 orang dengan persentase 39,7% bahwa penerima telah menggunakan dana bantuan BLT bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian, sebanyak 143 orang dengan persentase 60,3% merasa bahwa penerima telah menggunakan dana bantuan BLT sesuai kebutuhan sehari-hari. Dari data tersebut responden mayoritas menjawab bahwa mereka tidak mengetahui bahwa terdapat

penerima menggunakan dana BLT bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut berarti masyarakat penerima BLT sudah memaksimalkan dana dari program BLT tersebut sebagai untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan primer masyarakat. Hal ini dapat pula menunjukkan Masyarakat telah memiliki Growth Mindset (pola pikir yang berkembang) yakni sebuah pola pikir dimana para penerima memikirkan ke arah jangka Panjang (Rifa Nirmala, 2022). Dana yang diberikan 200 ribu perbulan tersebut memang bisa menjadi salah satu pemasukan tambahan masyarakat yang menerima program BLT. Masyarakat penerima BLT berusaha menggunakan dananya sebaik mungkin untuk kebutuhan sehari-hari terutama bagi masyarakat yang sangat memenuhi kriteria penerima BLT, mereka sangat terbantu memenuhi kebutuhan primernya.

Namun, beberapa responden yang menyatakan terdapat masyarakat yang menggunakan dana bukan untuk kebutuhan sehari-hari merasa bahwa masih terdapat masyarakat yang menggunakan dananya untuk belanja hal-hal yang tidak *urgent* atau hal-hal yang memang bukan untuk kebutuhan pemenuhan nutrisi seperti *shopping*, jalan-jalan dan lain-lain. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penerima BLT.

Tabel 13. Program BLT dapat membantu kehidupan ekonomi

Dana BLT Membantu Ekonomi Penerimaanya	Frequency	Percent
Sangat setuju	11	4.6
Setuju	185	78.1
Kurang setuju	35	14.8
Tidak setuju	5	2.1
Sangat tidak setuju	1	.4
Total	237	100.0

Sumber: Data primer (2023)

Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bahwa mayoritas responden setuju mengenai program BLT yang membantu kehidupan penerimaanya dengan persentase 78,1% hal tersebut karena program BLT sudah tepat sasaran kepada penerima yang benar-benar membutuhkan dari segi ekonomi sehingga masyarakat merasa program BLT ini sangat berarti dan membantu ekonomi penerimaanya. Selain itu, dana BLT membantu ekonomi penerimaanya karena dengan adanya program BLT ini dapat menambah pendapatan dari penerimaanya terutama untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kebijakan BLT bukanlah kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, namun adanya program BLT dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat walaupun BLT tidak secara langsung meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin (Maknolia & Dasrun, 2020).

Sedangkan sebanyak 14,8% responden yang menyatakan kurang setuju mengenai program BLT yang membantu kehidupan penerimaanya. Hal tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian target penerima BLT, dimana masyarakat yang menerima BLT merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi sudah baik, sehingga program BLT tidak berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi penerimaanya. Disisi lain, faktor lain yang menyebabkan masyarakat merasa kurang setuju bahwa program BLT membantu ekonomi penerimaanya karena dana BLT yang diberikan per bulannya tidak terlalu besar sehingga dianggap tidak terlalu berpengaruh.

Tabel 14. Program BLT mendorong penerimaanya untuk lebih aktif dalam kegiatan positif komunitas yang ada di Kelurahan Bobosan

Penerima BLT Lebih Aktif dalam Berkegiatan di Kelurahan Bobosan	Frequency	Percent
Sangat setuju	5	2.1
Setuju	60	25.3
Kurang setuju	153	64.6
Tidak setuju	16	6.8
Sangat tidak setuju	3	3.1
Total	237	100.0

Sumber: Data primer (2023)

Pada hasil survei tersebut mengenai perspektif masyarakat bahwa adanya program BLT mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dalam kegiatan positif komunitas di Kelurahan Bobosan masyarakat mayoritas kurang setuju terhadap hal tersebut yaitu 153 responden atau 64.6% dari keseluruhan responden yaitu 237. Dari data tersebut menjadi bukti meskipun masyarakat terbantu secara ekonomi dengan adanya program BLT ini, namun program ini tidak membuat masyarakat 100% berkontribusi atau membuat masyarakat terdorong lebih aktif dalam kegiatan komunitas di Kelurahan Bobosan. Hal tersebut terjadi karena adanya program BLT ini mampu membantu masyarakat dalam kehidupan ekonomi keluarga tetapi adanya program ini tidak cukup membantu masyarakat untuk menyalurkan kontribusi mereka terhadap lingkungan sekitar.

Penelitian dan data kuesioner tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat secara general mayoritas sudah mengetahui eksistensi program BLT meskipun tidak semua responden merupakan penerima BLT. Masyarakat Bobosan juga kebanyakan sudah mengetahui mengenai kenapa program ini ada, syarat, kriteria serta tujuan dari program BLT, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan penyebaran pengetahuan terkait program BLT ini sudah cukup baik serta pemerintah desa sudah cukup baik dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait program BLT serta *awareness* masyarakat terhadap program pemerintah yang ada di Kelurahan Bobosan cukup tinggi, sehingga mereka lebih terbuka dan mengerti adanya program pemerintah yang memiliki tujuan membantu ekonomi masyarakatnya.

Terkait dampak positif adanya program BLT seperti membuat penerima keluar dari ketergantungan, membantu ekonomi penerima, peningkatan kesejahteraan, mengurangi ketidakseimbangan, serta peningkatan positif dalam taraf hidup masyarakat Bobosan menyetujui hal tersebut. Tetapi, responden 64.6 % kurang setuju bahwa adanya program BLT ini membantu mendorong masyarakat lebih aktif dalam kegiatan positif komunitas Bobosan. Data tersebut menyatakan meskipun 78.1% responden menyatakan bahwa adanya program BLT membantu ekonomi penerimanya hal tersebut tidak membuat penerima BLT terdorong lebih aktif dalam kegiatan positif komunitas Bobosan. Kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat sudah mendapatkan dampak positif terhadap ekonomi mereka tetapi adanya Program BLT tersebut tidak mendorong mereka untuk semakin aktif dan berkontribusi untuk lingkungan sekitarnya.

Persepsi masyarakat terkait dengan program BLT mayoritas positif, terkait dengan pemahaman masyarakat mayoritas juga sudah mengetahui dan memahami adanya program BLT yang berarti pemerintah desa sudah cukup baik dalam melakukan sosialisasi. Masyarakat mayoritas setuju bahwa program ini dapat membantu perekonomian masyarakat Bobosan sehingga program ini dianggap sudah tepat sasaran dan eksistensinya membantu penerimanya. Perspektif masyarakat yang mayoritas positif menjadi bukti bahwa kebanyakan mereka sudah setuju program ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan mengenai program BLT.

V. KESIMPULAN

Hasil pengabdian ini akan menguraikan temuan data yang diperoleh dari 237 responden. Responden yang dipilih adalah masyarakat dari Kelurahan Bobosan baik yang menerima BLT maupun tidak menerima BLT. Analisis data yang digunakan adalah Distribusi Frekuensi. Persepsi ini diartikan sebagai cara pandang masyarakat atau tanggapan terkait adanya program BLT dari pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri.

Dari hasil penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Program BLT (Bantuan langsung tunai) di Kelurahan Bobosan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Responden sebanyak 134 orang dengan persentase 56,5% tidak ditetapkan sebagai penerima program BLT. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden didominasi oleh masyarakat yang tidak menerima BLT tetapi 103 orang sudah menerima program BLT hal tersebut berarti masyarakat kebanyakan sudah mengetahui dan merasakan langsung bagaimana program tersebut berjalan.

Berdasarkan hasil kuisisioner dapat diketahui bahwa mayoritas responden sebanyak 56.5%, tidak ditetapkan sebagai penerima program BLT. Hal tersebut menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang telah mendapatkan manfaat dari program BLT. Responden merasa menyanggkan kriteria yang seakan kurang memihak untuk mereka bisa mendapatkan program BLT itu sendiri. Ada faktor lainnya seperti tingkat pengangguran atau ketidakpastian panggilan untuk bekerja juga dapat mempengaruhi persepsi responden terhadap ketergantungan pada program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, I., dkk. (2022). Pengaruh Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Kampung Bagong Surabaya). *Vol. 1 No.1 (2022): Seminar Nasional 2022: "Transformasi Digital Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Pasca Pandemi"*.
- Akib, I., & Risfaisal, R. (2015). Bantuan langsung tunai. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2). DOI: <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i2.283>.
- Amran, Elsa Fitri dkk. (2022). Analisis Persepsi Masyarakat Nagari Tandikek Utara Tentang Bantuan Pemerintah Selama Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 10 No. 2*. DOI: <https://doi.org/10.26740/jupe.v10n2.p114-120>.
- Juanda, H. (2017). Media Sosial Sebagai Penyebarluasan Informasi Pemerintah Aceh. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 1(1).
- Maknolia, Yuliana dan Dasrun H. (2020), *Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 di Kota Bandung*, *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 3 No 2*.
- Mayasari, Nur Azizah. 2020. Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 (Studi Penelitian di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Mustarin, B. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Program Bantuan Langsung Tunai Pada Masa Pandemi Covid 19. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 208-220.
- Mustafa, Intan. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaduan Publik tentang Blt di masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(1), 130.
- Novrizal, M. (2022). Persepsi Masyarakat Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Bagi Masyarakat Miskin di Era Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus Desa Birem Puntong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa) (Doctoral dissertation, UNIMED).
- Safitri, I. O., Prastya, I. Y., & Akhyary, E. (2021). Kinerja Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai Kabupaten Karimun). *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 1248-1261.
- Setianingrum, T., & Tsalatsa, Y. (2016). Questioning the Responsiveness of Public Services on Management of Complaint Cases of UPIK in Yogyakarta City. 24, 1–25.
- Wahyuningsih, S., Yulianti, R., & Berthanilla, R. (2021). Effect of e-Government on Improving the Quality of Public Services in Serang Municipality. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 9(2), 213–233. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.4035Zellatifanny>.
- Nanang, M. (2015). Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. Depok: PT Rajagrafindo. Philip dan Nurul, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Tahun 2009) Portal Informasi Indonesia. (2020). *Pagebluk belum Usai, Rakyat Dapat Dana Tunai*.
- Sugiono, (2014). Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sugiono, (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Dinsos.jogjaprovo.go.id Pertanyaan yang Sering Diajukan <https://dinsos.jogjaprovo.go.id/alur-pendaftaran-fakir-miskin-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks-dan-mekanisme-verifikasi-dan-validasi-data-dtks/>. 10 November 2023.
- Setkab Indonesia. *Pemerintah Berikan 6 Program Bantuan Tambahan Hadapi Pandemi Covid-19.2020*.<https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3861-penyaluran-blt-desa-dibandingkan-dengan-angka-kemiskinan.html>. 27 Oktober 2023.